

DI SAJIKAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III

PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK

BIODATA

- Nama : **Daud Eliezar**
- Riwayat Pekerjaan : - BPS Provinsi Kalimantan Tengah (1996 – 2001)
- Pusdiklat BPS (2002 – sekarang)
- Riwayat Pendidikan : - Akademi Ilmu Statistik (1996)
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2010)
- Nomor HP : **081213748545**
- Alamat e-mail : **desinaga@bps.go.id**





Tujuan Pembelajaran

Deskripsi Singkat

Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta diklat prajabatan, disajikan berbasiskan Experiential learning ;

dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus simulasi dan demonstrasi.

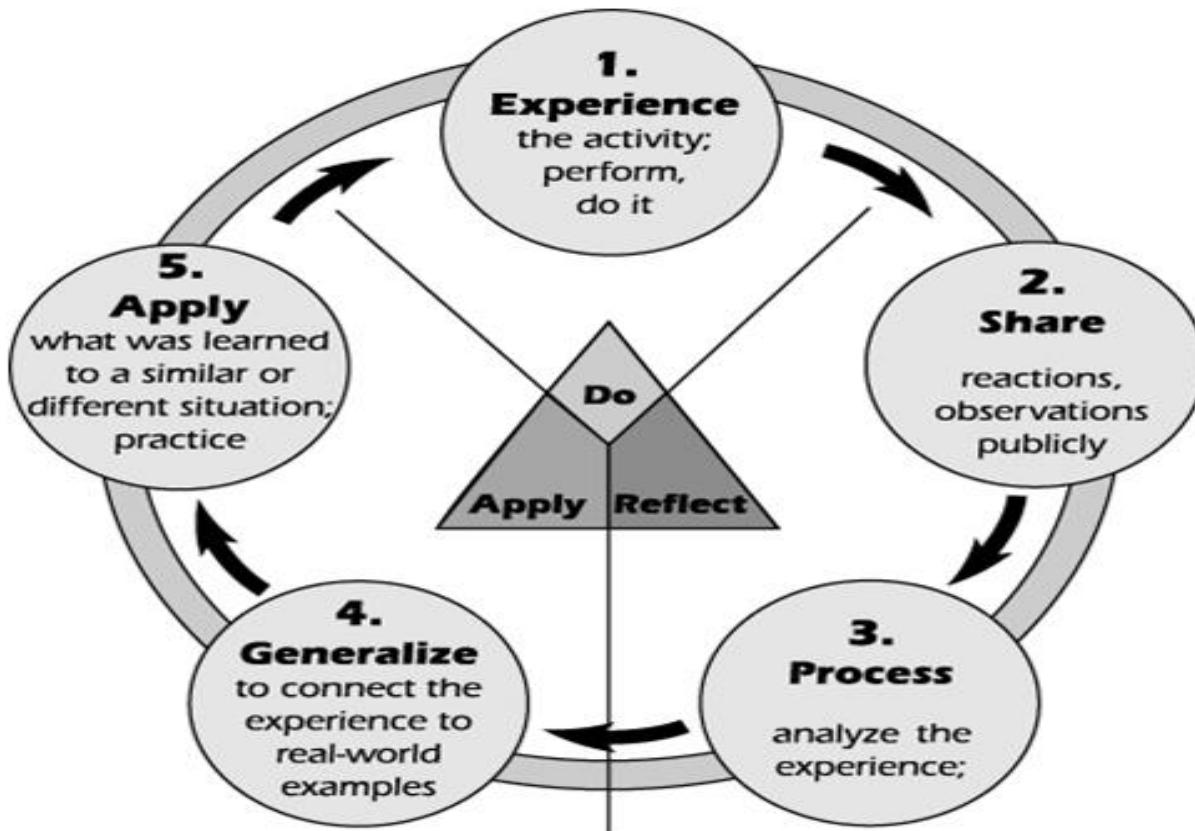
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola jabatannya.

Change Policy

*(Kebijakan
Rembahan)*

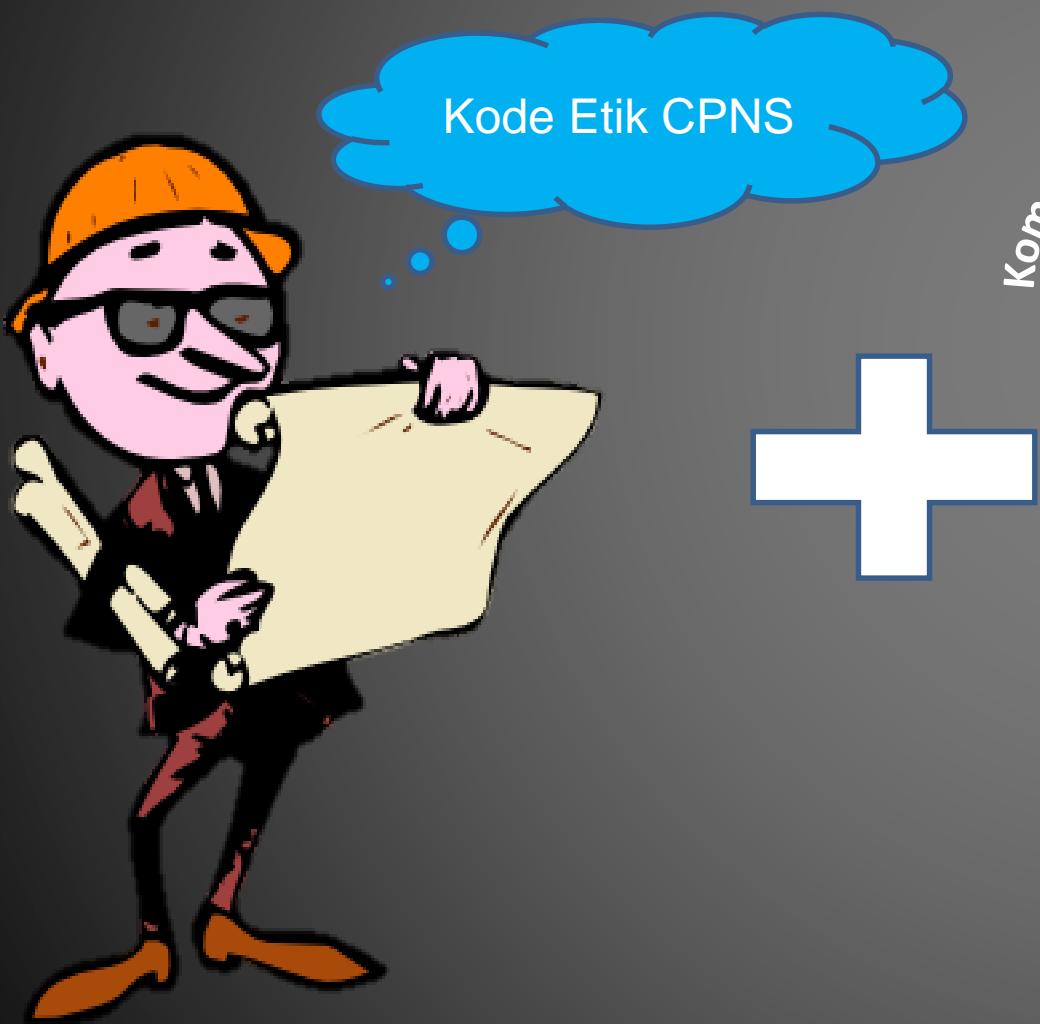
*Diklat
Prajabatan*

Metode EXPERIENTIAL LEARNING

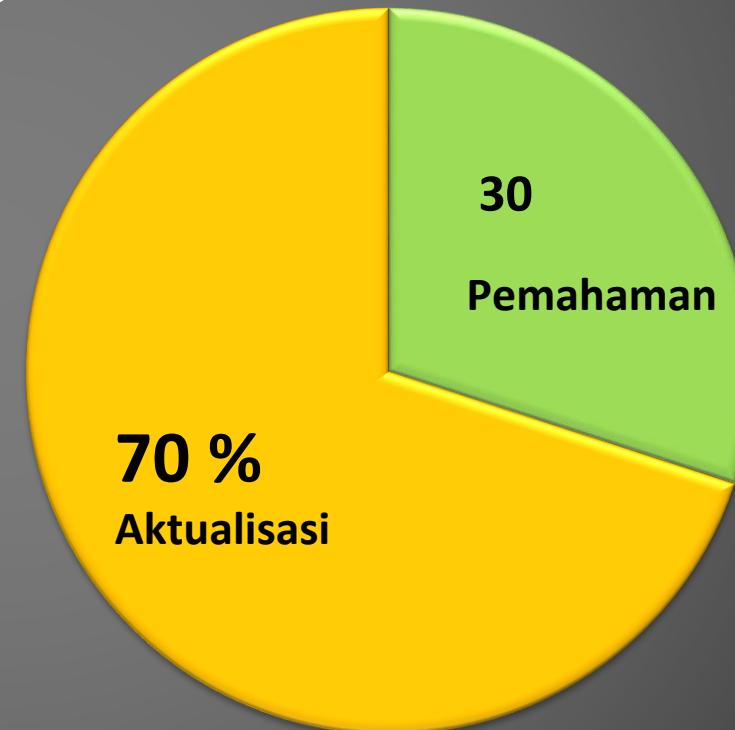


- Metode yang digunakan adalah experiential learning model, seperti konsep model Kolb (1984) dan Kurt Lewin, yang memiliki konsep model deskriptif untuk proses pembelajaran orang dewasa.

EVALUASI TERHADAP PESERTA DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU



Komponen Penilaian Diklat Prajabatan Pola baru



Materi POKOK dan Sub Materi POKOK

Modul I

A. Sadar Anti Korupsi

- Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- Pengertian Korupsi
- Tindak pidana Korupsi
- Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi
- Indonesia Bebas Korupsi

Modul II

B. Semakin Jauh Dari Korupsi

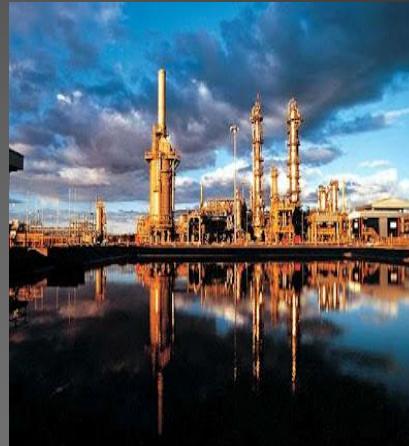
- Tunas Integritas
- Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi
- Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi
- Penanaman Nilai Integritas
- Bangun Sistem Integritas



Indonesia bumi
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan
yang luar biasa



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



Tambang Emas Terbesar



Batu Bara Terbaik



Tanah yang Subur

Utang Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2010-2015 (Grafik)



Utang Pemerintah RI Rp 3.021 triliun

Dalam 10 bulan, atau Januari Oktober 2015, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat naik Rp 412,52 triliun, menjadi Rp 3.021,3 triliun. Berikut ini data dan perbandingan utang pemerintah dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (20/11/2015).

TOTAL UTANG PEMERINTAH:

2010
Rp 1.681 T

2011
Rp 1.808,95 T

2012
Rp 1.977,95 T

2013
Rp 2.375,5 T

2014
Rp 2.608,78 T

Pinjaman
Rp 729,51 T ▲ dari Rp 677,56 T di 2014

Pinjaman Luar Negeri
Rp 725,64 T ▲ dari Rp 674,33 T di 2014

Pinjaman Dalam Negeri
Rp 3,68 T ▲ dari Rp 3,22 T di 2014

Surat Berharga/Surat Utang
Rp 2.291,75 T ▲ dari Rp 1.931,22 T di 2014

Dalam mata uang dolar AS, total utang pemerintah pusat hingga Oktober 2015 mencapai:
Rp US\$ 221,52 M ▲ dari US\$ 209,71 M di 2014

Berita Utang Indonesia

Rabu 21 Sep 2016, 06:55 WIB

Utang Pemerintah RI Rp 3.438 T, Naik Rp 78 T Dalam Sebulan

Wahyu Daniel - detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Agustus 2016 adalah US\$ 258,52 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2016 yang sebesar US\$ 256,59 miliar.

Berita Utang Indonesia

Selasa 22 Nov 2016, 06:33 WIB

Turun Tipis, Utang Pemerintah RI Kini Rp 3.439,78 T

Wahyu Daniel - detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Oktober 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.439,78 triliun. Turun tipis Rp 5 triliun dibandingkan akhir September 2016, yaitu Rp 3.444,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Oktober 2016 adalah US\$ 263,56 miliar, turun dari posisi akhir September 2016 yang sebesar US\$ 265,03 miliar.



Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia

(Juta orang*)



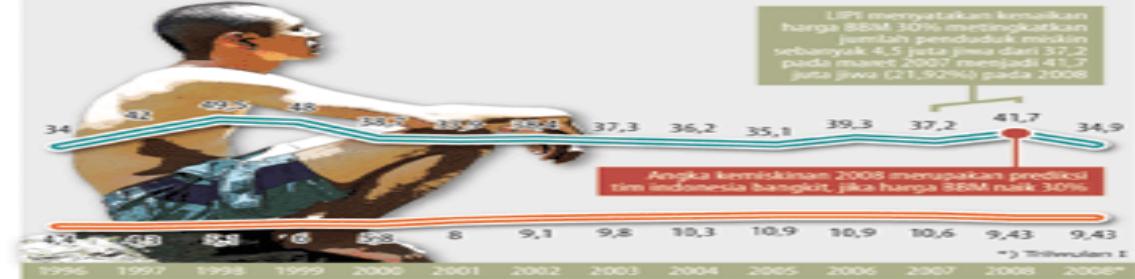
Daerah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi Maret 2013

Papua	31,13%
Papua Barat	26,67%
Maluku	20,33%
Nusa Tenggara Timur	20,03%
Bengkulu	18,34%
Nusa Tenggara Barat	17,97%
Aceh	17,6%
Gorontalo	17,51%

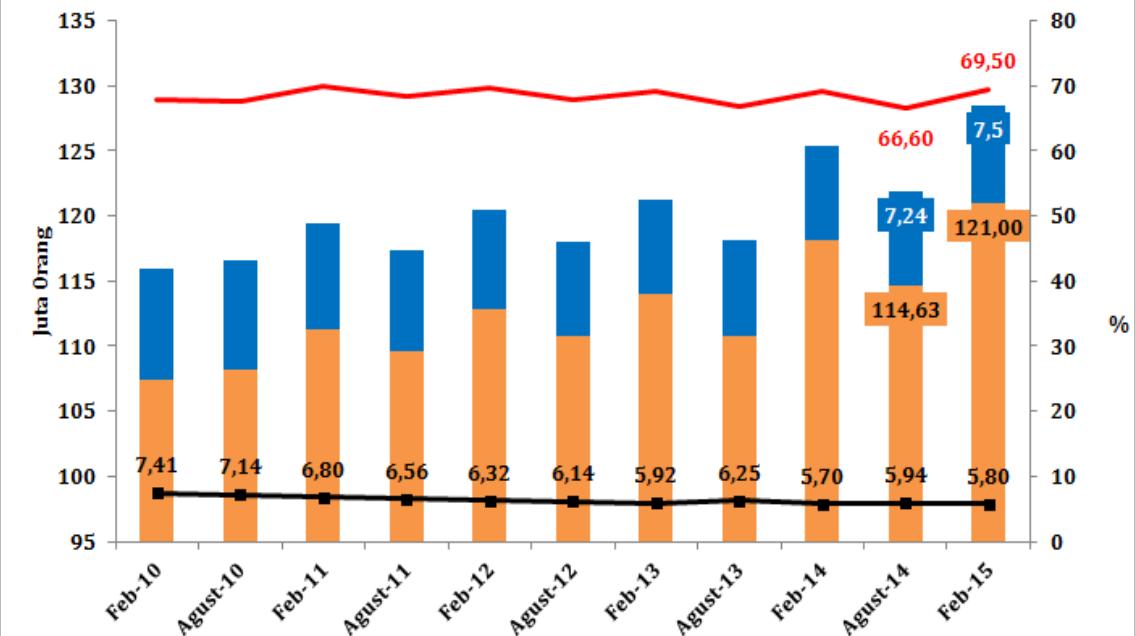
Sumber: BPS/Ghp



Jumlah Penduduk Miskin & Pengangguran (dalam juta jiwa)



Angka kemiskinan 2008 merupakan prediksi tim Indonesia bangkit, jika harga BBM naik 30%



Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Mengapa kekayaan yang dimiliki negara
Indonesia belum bisa membuat rakyat
Indonesia makmur?



Kajian Dampak Perilaku Korupsi

Kajian

1.	Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar (Depken and Lafountan, 2006)
2.	Harga Infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005)
3.	Tingkat Korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi and Alonso-Terme, 2002)
4.	Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995)
5.	Persepsi Korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
6.	Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)

Kerusakan hutan dan lingkungannya
Bangunan yang cepat rusak
Penegakkan Hukum yang tidak adil
Pelayanan Publik yang buruk
Peredaran Narkoba
Sumber Daya Alam melimpah Rakyat tetap sengsara, dll. Fenomena yang terjadi

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

Perceived levels of public sector corruption in 176 economies



Top economies perceived as "Very Clean"

Rank		Score
1	Denmark	90
1	New Zealand	90
3	Finland	89
4	Sweden	88
5	Switzerland	86

Top economies perceived as "Highly Corrupt"

Rank		Score
176	Somalia	10
175	South Sudan	11
174	North Korea	12
173	Syria	13
170*	Yemen	14

* Also ranked 170th are Sudan and Libya

HOW SELECT ASIA-PACIFIC ECONOMIES ARE PERCEIVED

Rank		2012	2013	Score	2014	2015	2016
7	Singapore	87	86	84	85	85	84
41	Brunei	55	60	N/A	N/A	58	
55	Malaysia	49	50	52	50	49	
79	China	39	40	36	37	40	
79	India	36	36	38	38	40	

Tabel 1
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2015

	Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2		8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
9		54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
11		76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
15		88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
16		95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
17		112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
24		147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

Sumber: Corruption Perception Index 2015



perceptions of corruption within the past two years.

INDONESIA

2014 Score Rank
34 **107 / 175**

2013 Score 2012 Score
32 **32**

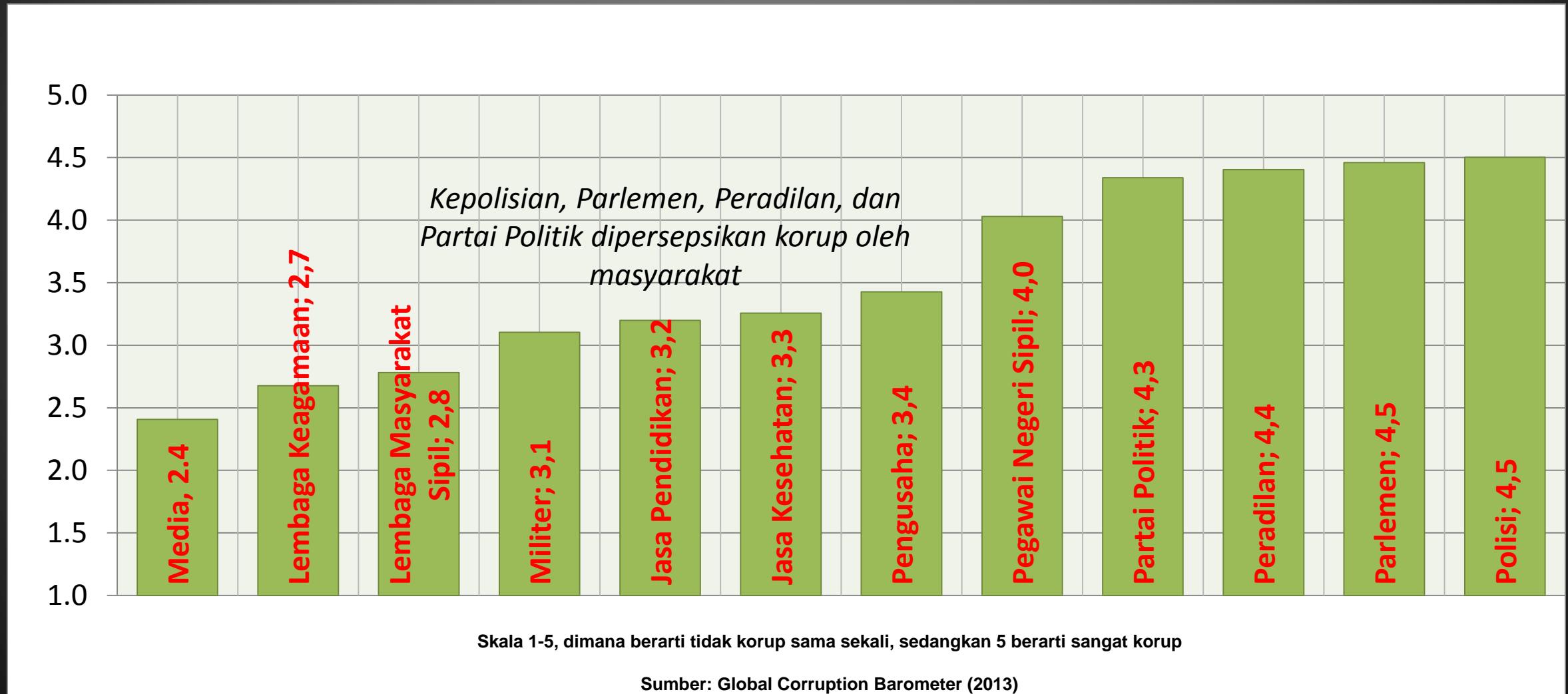


Rank		2012	2013	Score	2014	2015	2016
90	Indonesia	32	32	34	36	37	
101	Philippines	34	36	38	35	35	
101	Thailand	37	35	38	38	35	
101	Timor-Leste	33	30	28	28	35	
113	Vietnam	31	31	31	31	33	

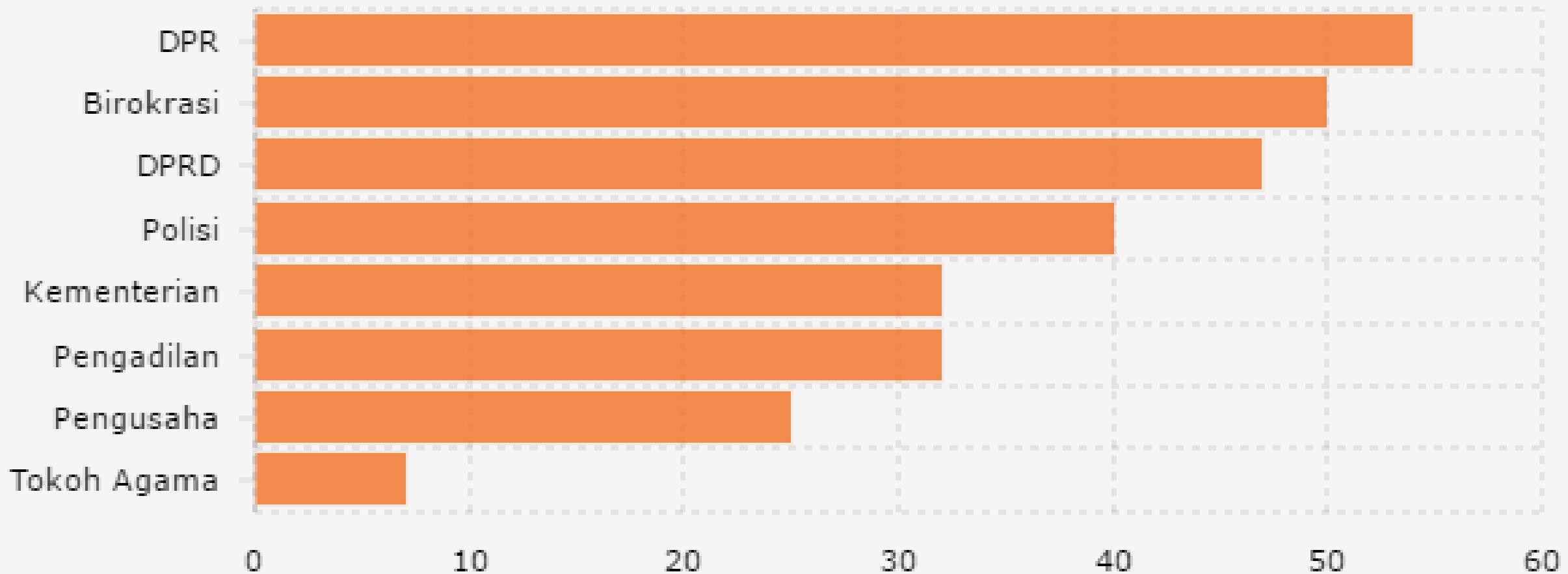
Rank		2012	2013	Score	2014	2015	2016
123	Laos	21	26	25	25	30	
136	Myanmar	15	21	21	22	28	
156	Cambodia	22	20	21	21	21	

SOURCE: TRANSPARENCY INTERNATIONAL
BUSINESSWORLD GRAPHICS: BONG R. FORTIN

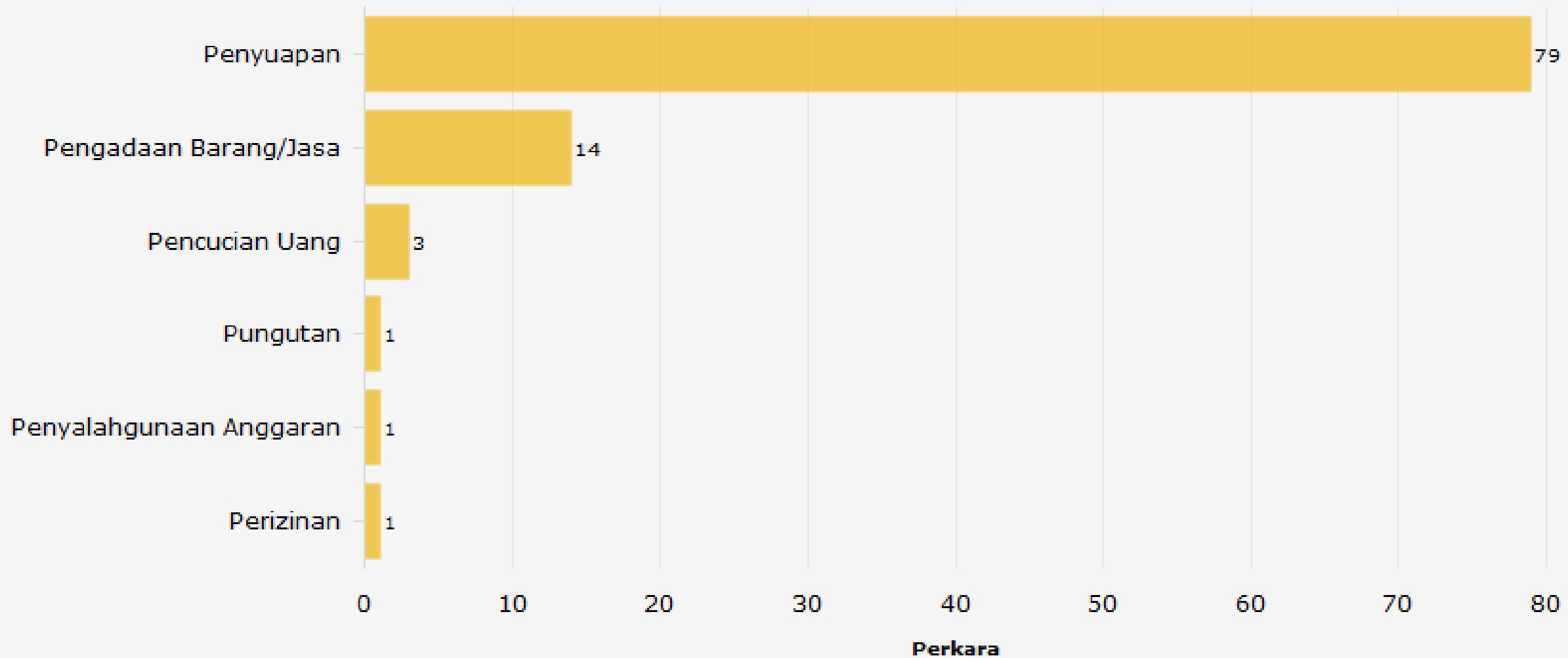
Problem korupsi Indonesia: korupsi birokrasi dan politik



Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Transparency International pada 2017



Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus

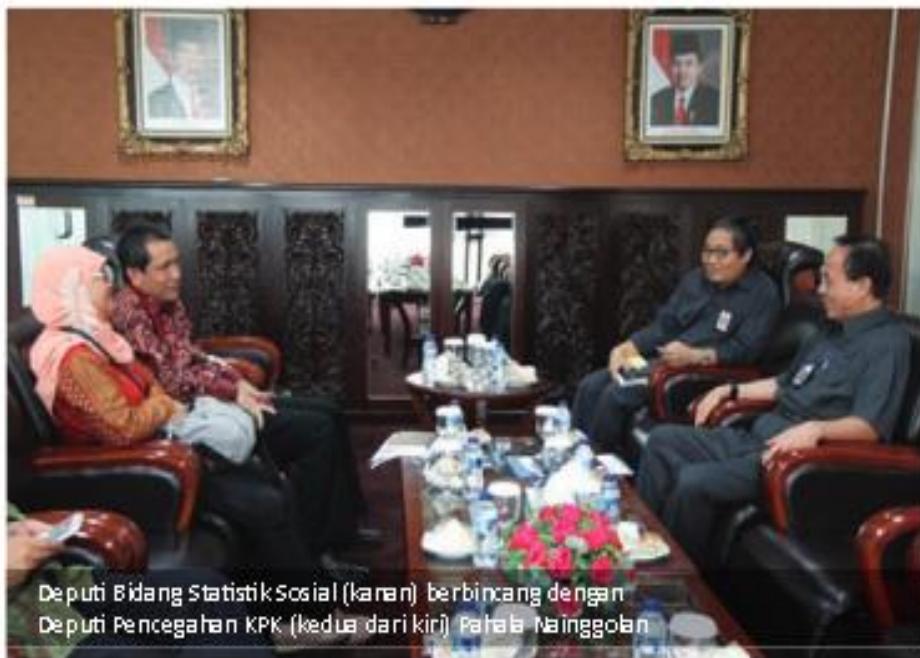


INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2015 MENURUN

Untuk kali keempat, BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015 di Gedung 3 lantai 1 BPS (22/2). Dalam survei yang melibatkan sampel 10.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 170 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2015 ini menghasilkan indeks sebesar 3,59 atau lebih rendah 0,02 poin dibandingkan dengan IPAK 2014 sebesar 3,61. "Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi," jelas Suryamin, Kepala BPS.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial, M.Sairi; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan; Direktur Analisa Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan *Country Manager* United Nation Office on Drugs and Crime, Collie Brown. Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo yang awalnya dijadwalkan hadir, batal datang karena adanya pembahasan amandemen UU KPK di hari yang sama.

Lebih lanjut, Suryamin mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap dua dimensi ini Pahala menanggapi, "KPK tidak terlalu mempersalahkan terjadinya penurunan dalam IPAK 2015. Justru survei ini sangat



Deputi Bidang Statistik Sosial (kanan) berbincang dengan Deputi Pencegahan KPK (kedua dari kiri) Pahala Nainggolan

bermanfaat karena dilakukan secara kuantitatif dan berdasarkan fakta di lapangan. Dari dimensi persepsi saya pikir teman-teman media sudah cukup berhasil menginfokan ke masyarakat dalam membentuk pengetahuan anti korupsi. Akan tetapi tidak demikian faktanya di lapangan. Masih banyak praktik korupsi ditemui di pelayanan publik. Oleh karenanya survei ini sangat membantu KPK untuk mendukung diwujudkannya pelayanan terpadu satu pintu," tutur Pahala di akhir konferensi pers.

■ V2



Korupsi bagaikan BOM waktu yang dapat meledak kapan saja dan menghancurkan bangsa ini



by: udin samsudin-jkt

KORUPSI BAGAIKAN
BOM WAKTU



COMBATING CORRUPTION



THE MISSION CONTINUES







• Dasar Hukum

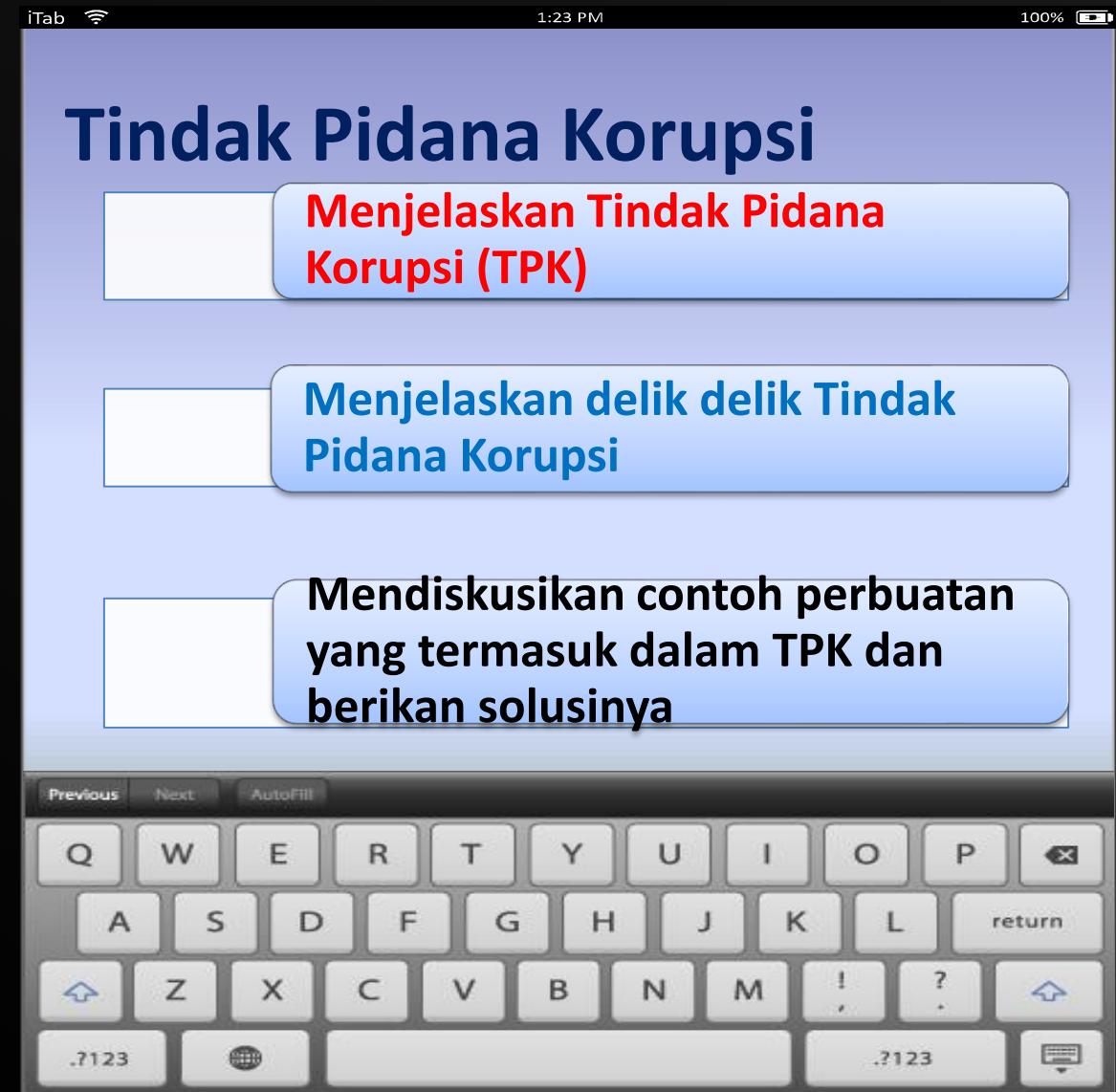


- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;





Dagang Pengaruh Mesti Dijadikan Delik Hukum

DENGAN adanya pola tindak pidana korupsi baru, yakni mendagangkan pengaruh yang diduga melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, sejumlah pihak mendesak adanya perubahan perangkat regulasi anti-korupsi. Dagang pengaruh mesti dimasukkan sebagai delik hukum.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Miko Ginting, kemarin. Menurutnya, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengakomodasi ketentuan mengenai mendagangkan pengaruh. Namun, ketentuan mendagangkan pengaruh sudah terdapat dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Miko lebih lanjut mengatakan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006, masih disyaratkan untuk dibentuk ketentuan khusus guna mengimplementasikan delik mendagangkan pengaruh. Dasar jalannya proses peradilan pidana bagi seseorang ialah hanya apa yang sudah tertera dalam undang-undang.

"Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif. Agar kasus dengan pola serupa di kemudian hari dapat diberat dengan delik mendagangkan pengaruh," tukasnya.

Namun, meski hal itu belum diatur dalam UU, Miko mendesak KPK mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam perkara suap kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman, komisaris MNC Group, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tuntas dalam arti KPK harus mampu membongkar semua aktor, pola, dan jaringan dalam kasus ini," tukasnya.

KPK membidik oknum Bulog pada perkara

"Pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif."

Miko Ginting

Peneliti Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan Indonesia

dugaan suap yang melibatkan Irman. "Ini bergantung pada hasil dari pengembangan. Kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (keterlibatan oknum Bulog) kita pasti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung DPR, kemarin.

Syarif hanya mengatakan bahwa KPK sudah mendapatkan informasi bahwa Irman sempat menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti terkait kuota gula impor. "Salah satunya ada rekomendasi."

Menurutnya, KPK akan mengembangkan perkara ini dengan dasar bukti yang nantinya didapat dalam proses penyidikan perkara yang telah menjerat Irman. Itu termasuk mendalami pemberian lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, kepada Irman senilai Rp100 juta. "Itu juga sedang kami dalami," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan Irman dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di Jakarta (17/9). "Selalu dari awal laporannya dari masyarakat. Itu juga tidak ditelan begitu saja, selalu kita analisis," terangnya di Gedung DPR. (Cah/X-S)

パン・ロード子牧店
名産アイスクリーム
田辺製菓

MOVIE TIME

WHAT is
GRATIFICATION



KLIPING



LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan hari raya, KPK mengajak seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami sebagai berikut:

1. KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, terutama di dunia usaha dan masyarakat untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
2. Bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran menjelang perayaan hari raya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi dan relaksasi/pengusahai masyarakat yang umumnya berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagai pihak yang potensial menerima gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain oleh sejumlah pejabat publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis. Hal ini pada prinsipnya dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang menuju ke arah Tindak Pidana Korupsi (TPK), dapat menimbulkan benturan kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat;
4. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara beserta keluarganya baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas ataupun pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditolak. Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya, wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di institusi masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima;



5. Kepada setiap pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melerang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas dan pegawai untuk kepentingan pribadi seperti untuk kegiatan mudik, mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedisiasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
6. Kepada Satuan Pengawas Internal atau UPG pada setiap instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD diharapkan melakukan pemantauan, pendataan dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan gratifikasi maupun penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Selanjutnya penerimaan gratifikasi tersebut segera disampaikan ke KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
7. Kepada Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan Swasta agar dapat memberikan imbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing untuk tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun terkait Perayaan Hari Raya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa memberikan uang, gratifikasi atau uang pelicit, agar melaporinya kepada KPK pada kesempatan pertama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di www.kpk.go.id/gratifikasi atau email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau dengan mengakses web pemerintah gmifka online di <https://gol.kpk.go.id> atau menghubungi nomor telepon 0122-455-9777 atau 0852-2222-0000.

Pimpinan KPK beserta jajaran mengucapkan selamat hari raya, semoga Allah SWT memberi ibadah kita dan senantiasa memberikan berkah, rahmat, dan perlindungan di hari yang sangat suci.

Mohon maaf lahir dan batir



Pengertian Korupsi

Korupsi adalah diskresi dan monopolii tanpa adanya akuntabilitas

$$K = D + M - A$$

*K*orupsi

*D*iskresi

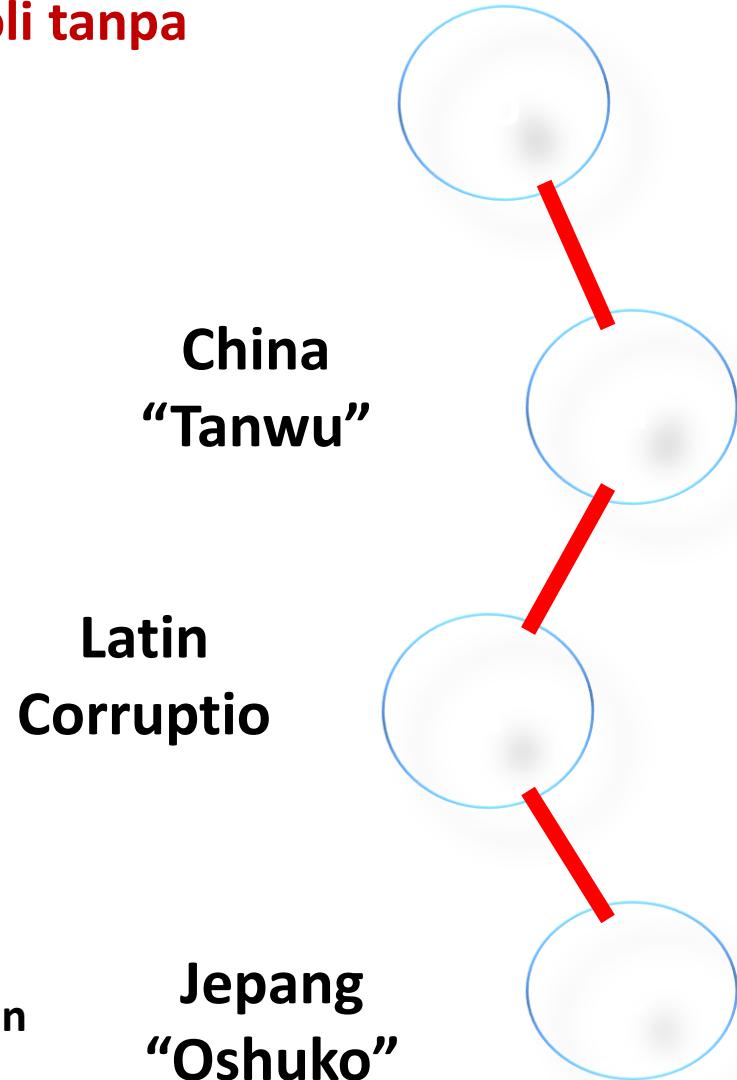
*M*onopoli

*A*kuntabilitas

Diskresi (KBBI) = kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi

Monopoli (KBBI) = hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)

Akuntabilitas (wikipedia) = pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan



**Muangthai
“Gin Moung”**

Lingkaran dengan kode yang menunjukan arti dari berbagai istilah korupsi :

- a. Kerusakan atau kebobrokan
- b. Makan Bangsa
- c. Kerja Kotor
- d. Keserakahan Bernoda

10 DIMENSI KORUPSI (UN)

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)



Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.



Peta Korupsi

1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan
2. Pemerasan kepada wajib pajak
→ Transparansi & akuntabilitas sistem pajak
3. Manipulasi data → Perbaikan sistem
4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI

1. Penyalahgunaan perizinan
→ Perbaikan sistem kewenangan
2. Tidak ada single data base
→ Integrated database
3. Penyelewengan penyetoran
→ Perbaikan sistem penerimaan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan
→ Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.



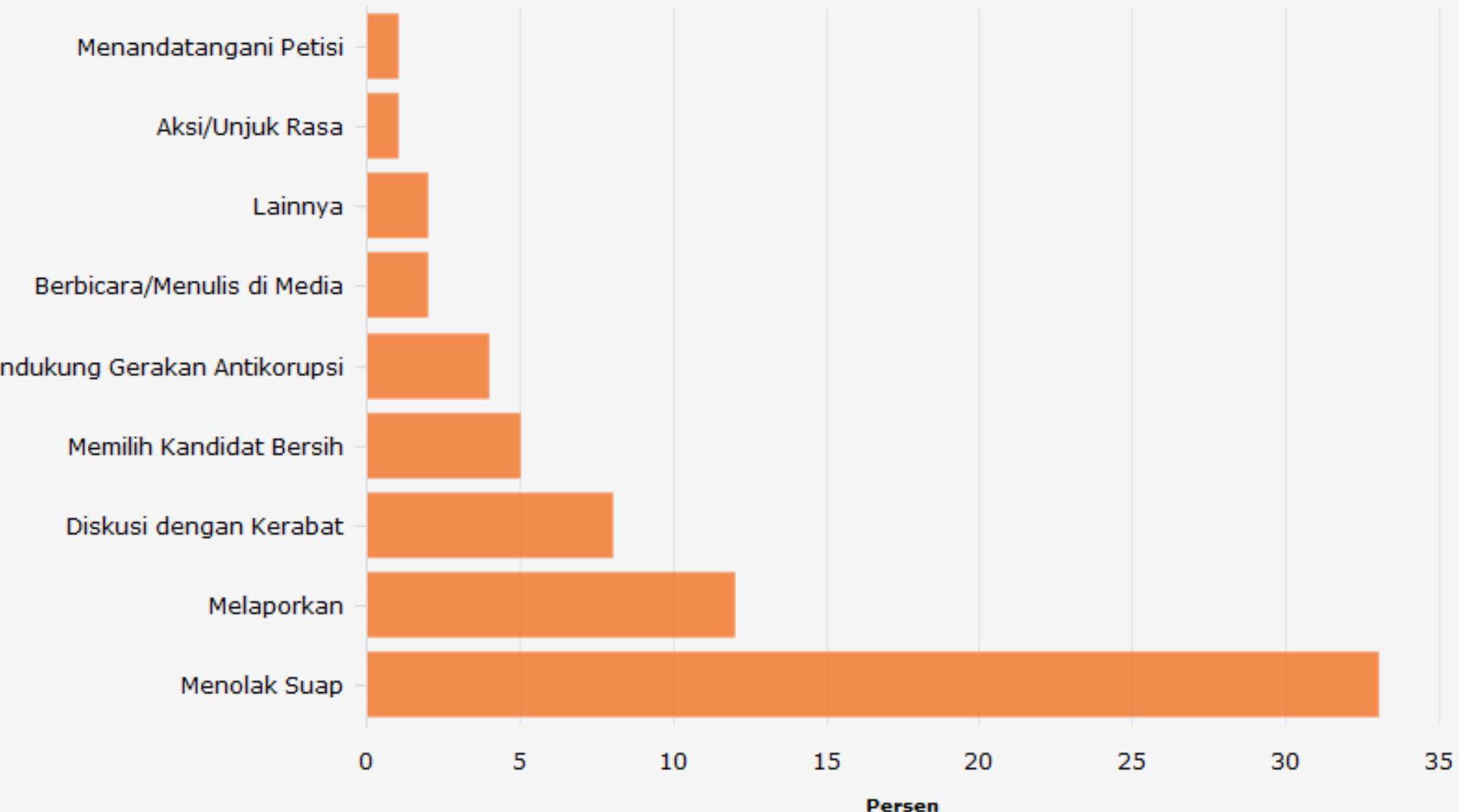
1. Masuk pada APBD:
Penyalahgunaan wewenang, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3. Alokasi penggunaan tidak transparan
→ Perbaikan sistem

1. PERDA tak mengacu pada perUU – penertiban Perda
2. Penghasilan aparat – penindakan

1. Penyimpangan peruntukan
2. Penggelapan
3. Fiktif
→ Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

Bagaimana Upaya untuk Memerangi Korupsi?

Survei Upaya Warga di Indonesia Untuk Melawan Korupsi oleh Transparency International





JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Korupsi Begitu Dekat Dengan Kehidupan Se-hari Hari



Fakta Hukum Dilapangan



Kasus Kasus Dibidang :

**Eksekutif
Legislatif
Yudikatif**



**Terima Duit dari OC Kaligis,
Hakim PTUN Medan Dihukum 2
Tahun Bui**

Ferdinan - detikNews



detikcom

Foto: Ferdinan/detikcom

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum hakim PTUN Medan, Sumut, Amir Fauzi, 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Amir terbukti menerima duit suap sebesar USD 5 ribu dari OC Kaligis.

KPK: 39 Persen Perempuan Diam Saja jika Lihat Korupsi

JUM'AT, 13 MEI 2016 | 04:14 WIB



Sejumlah wanita yang tergabung dalam Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi melakukan aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung KPK, Jakarta, 10 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Balikpapan - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan menyatakan 39 persen perempuan Indonesia diam saja kala mengetahui tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada terhadap responden di Kota Garut dan Makassar.

2015, Pelaku Korupsi Didominasi PNS

MINGGU, 07 FEBRUARI 2016 | 15:04 WIB



Penuntut umum menunjukan uang dari dalam kardus duren dalam sidang lanjutan kasus suap Kemenakertrans dengan terdakwa Dharnawati di Pengadilan Tindak pidana korupsi, Jakarta (5/12). Dharnawati mengaku sempat kesal karena terus didesak untuk membayar commitment fee oleh pejabat Kemenakertrans. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian Indonesia Corruption Watch terhadap vonis perkara korupsi selama 2015 menunjukkan angka korupsi di lingkaran pemerintah, terutama pemerintah daerah, masih tinggi.

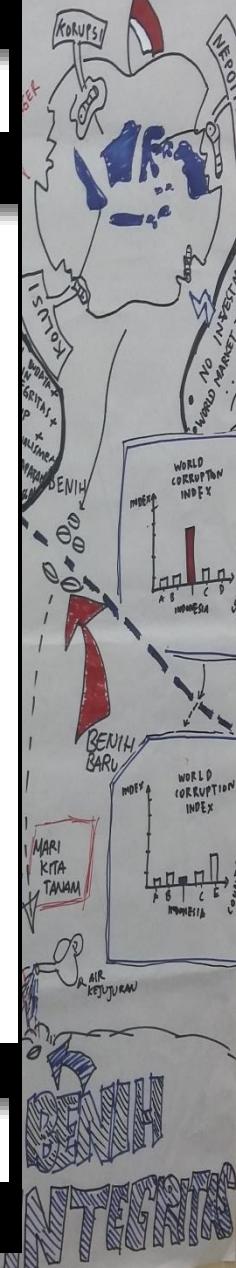
"Pantauan kami, ada 225 terdakwa korupsi dari lingkungan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah. Sementara itu, di swasta, ada 140 terdakwa," ujar anggota Divisi monitoring dan Hukum Peradilan ICW Aradila Caesar, Ahad, 7 Februari 2016.

D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi



1. Memutar Film "Integrasi(kan) Integritas"
2. Berikan kesimpulan dari Film "Integrasikan Integritas" tersebut.
3. Apa kaitannya Film tersebut dengan Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi?
4. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah dilakukan tetapi korupsi masih tetap jalan terus, korupsi bahkan terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengapa korupsi masih terus berjalan? Langkah apa yg perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?



D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

SPIRITUAL

ACCOUNTABILITY yang baik
akan menimbulkan Niat Baik





D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

Spiritual Accountability

Visi & Misi Baik

Usaha Terbaik

Hasil Terbaik

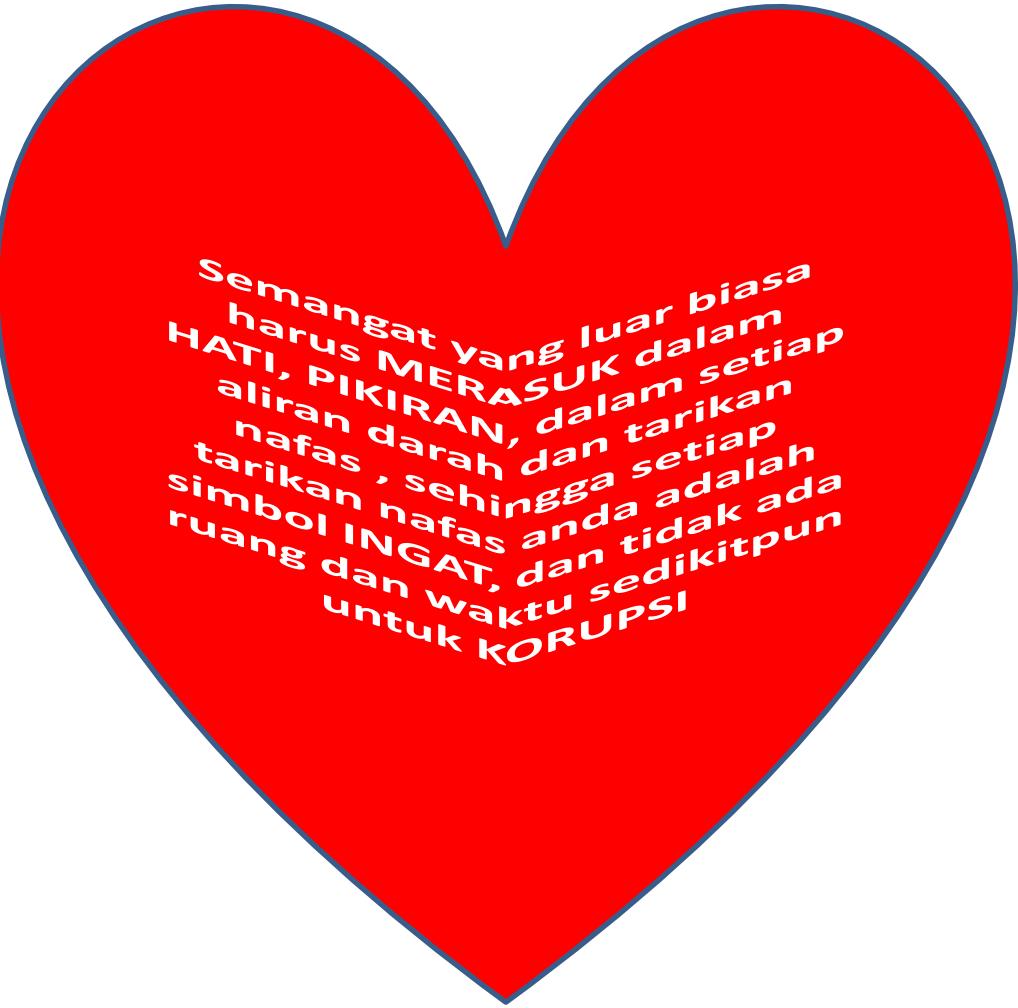
AMANAH, kesadaran diri bahwa hidup kita harus dipertanggung jawabkan mereka yang amanah akan selalu ingat perjanjian dengan Tuhan, pada saat di alam Ruh

NIAT BAIK

Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhan, ia tidak ingin merusak perjanjian dengan Tuhan dan akan menjadi beban bagi kehidupan sehari-hari

SPIRITUAL ACCOUNTABILITY yang baik akan menimbulkan Niat Baik

SEMANGAT ANTI KORUPSI



Semangat yang luar biasa harus MERASUK dalam HATI, PIKIRAN, dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas , sehingga setiap tarikan nafas anda adalah tarikan INGAT, dan tidak ada simbol INGAT, dan tidak ada ruang dan waktu sedikitpun untuk KORUPSI

Stephen L Carter (1996)

Integritas Merupakan Upaya Positif Terkait Korupsi

KOMITMEN INTEGRITAS



SAAT ANDA TELAH MENCAPAI KESADARAN ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH DAN UTUH, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK HANYA SAMPAI MENJADI SEMANGAT, NAMUN AKAN TERUS BERGERAK HINGGA MENJADI KOMITMEN INTEGRITAS. ANDA SUDAH MELANGKAH LEBIH JAUH , BUKAN SEKEDAR MENGHINDARI NAMUN MENCARI SOLUSI TERHADAP FENOMENA KORUPSI



ASN DAN CITA-CITA BANGSA

- Undang-Undang ASN lahir dalam rangka mencapai cita-cita bangsa
- Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945
- Bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain memajukan kesejahteraan umum diperlukan Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan Pemerintah Negara yang : (1) Profesional (2) bebas dari intervensi politik (3) bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta (4) mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
- Amanat Undang-Undang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara harus mampu memerankan diri sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



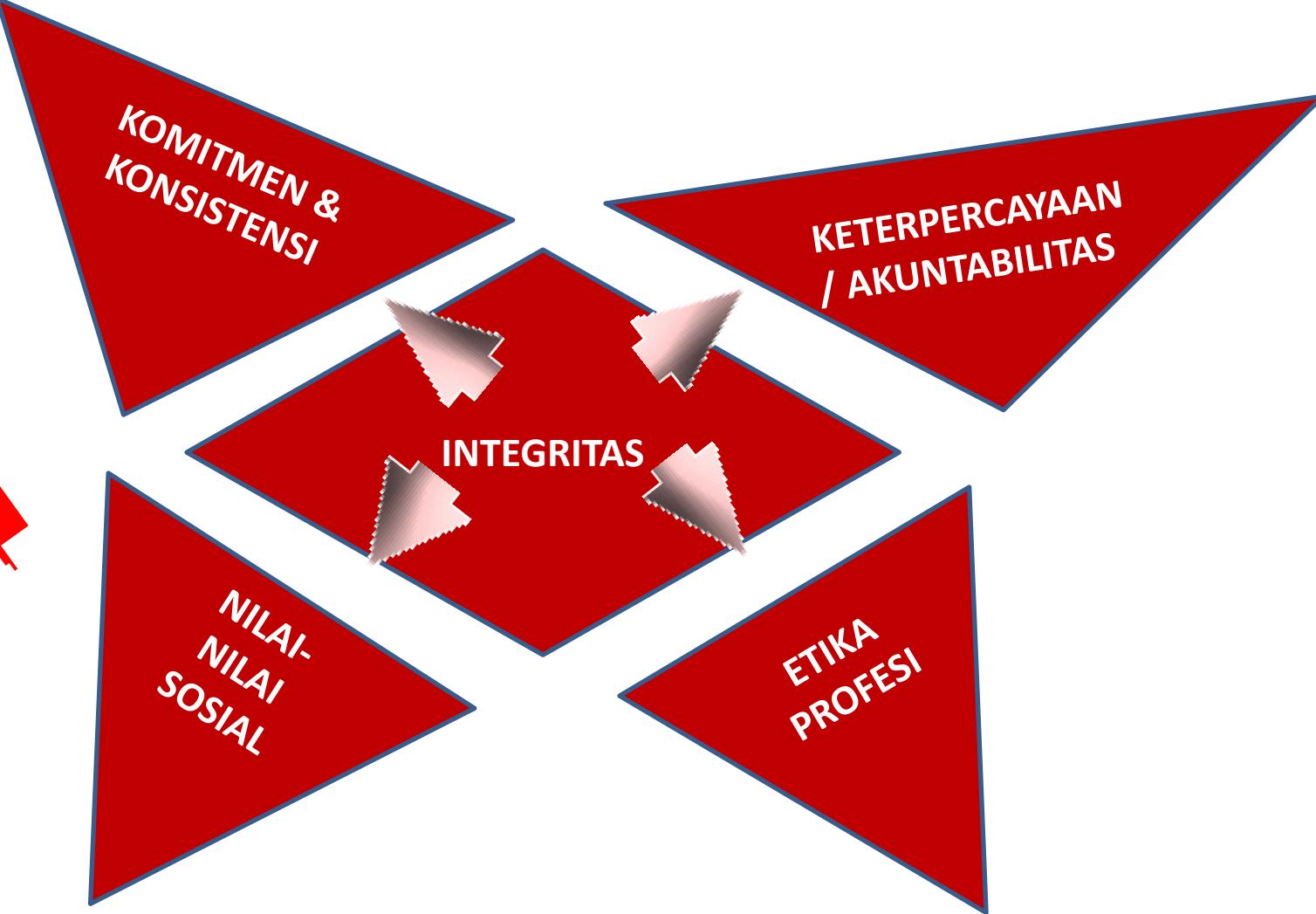


INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



SIN : Sistem Integritas Nasional adalah
inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara
terintegrasi yang dikaitkan dengan
pencapaian tujuan nasional

Dreamtegrity : Impian Indonesia
Berintegritas



NIAT
KEJUJURAN
KETULUSAN HATI
KEBERSAMAAN
KEPEDULIAN
KEADILAN

RE-FRAMING CULTURE



Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran (paradigma) atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi (konteks) menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia.

Gotong Royong

Kandungan Budaya

Perilaku

Dilakukan bersama-sama

Ucapan

Ajakan bersama-sama
Bersama kita bisa!

Emosi

Menyukai kebersamaan
Senang saling bantu

Pikiran

Punya persepsi bahwa bersama-sama
lebih baik atau mudah

Mengubah orientasi (niat)
tanpa harus mengubah kandungan yang
membentuk budaya

BUDAYA

Reframing
Culture

Kolusi



7 semangat dasar yang diharapkan dapat di tumbuhkan kembali di bumi Pertiwi Indonesia

- 1. Semangat ketakwaan pada Tuhan;**
- 2. Semangat keikhlasan dan ketulusan;**
- 3. Semangat pengabdian dan tanggungjawab;**
- 4. Semangat menghasilkan yang terbaik;**
- 5. Kekeluargaan;**
- 6. Semangat keadilan dan
kemanusiaan;**
- 7. Semangat perjuangan;**



C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI



PEMBINAAN & PENGAWASAN WBK

- **Terhadap Unit Kerja** (untuk mempersempit kesempatan)
 - perbaikan sistem & prosedur;
 - perbaikan sarana;
 - penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb.
- **Terhadap Pegawai** (untuk meluruskan niat)
 - pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yg efektif.

- **Pemantau independen** (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
- **Masyarakat.**





Tunas Integritas



Selesai Dengan Dirinya

Negeri ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ia tidak identik dengan orang kaya, karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari tambahan kekayaan, bahkan menambahnya lewat korupsi.



Berorientasi pengabdian
kompeten
bahagia

" PERJUANGANKU LEBIH MUDAH
KARENA MENGUSIR PENJAJAH,
PERJUANGANMU AKAN LEBIH SULIT
KARENA MELAWAN BANGSAMU SENDIRI."

Bachannan

MENYEMBUT HARI PAHLAWAN
10 NOVEMBER



